

Penerapan asas proporsionalitas sebagai landasan pertukaran hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian waralaba: studi kasus perjanjian waralaba Bangi Kopitiam antara PT. Indo Bangi Kopitiam dan PT. Trimitra Oryza Sativa = Implementation of principle of proportionality as the foundation of rights and obligations distribution for parties in the franchise agreement: case study on franchise agreement of Bangi Kopitiam between PT. Indo Bangi Kopitiam and PT. Trimitra Oryza Sativa

Reyhan Savero Pradietya, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20444349&lokasi=lokal>

Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai penerapan asas proporsionalitas dalam melandasi pembagian hak dan kewajiban antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba dalam setiap proses perjanjian waralaba. Asas proporsionalitas ini akan dilihat dari peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode kepustakaan dan wawancara narasumber. Hasil penelitian ini adalah perjanjian waralaba yang dibuat oleh para pihak dinilai sah dan telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun demikian, masih terdapat permasalahan dalam proses pembentukan dan pelaksanaan perjanjian yang kurang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai waralaba. Permasalahan tersebut berpengaruh terhadap kurang tercapainya penerapan asas proporsionalitas yang baik dan fair. Penulis menyarankan agar pemerintah sebaiknya membuat ketentuan waralaba yang lebih spesifik dan terarah, serta lebih berorientasi pada prinsip proporsionalitas.

.....This thesis provides explanation regarding the implementation of principle of proportionality in distributing the rights and obligations for franchisor and franchisee in each process of franchise agreement, which will be observed from the perspective of law and doctrines. This thesis applies a normative legal study with bibliographical method and interviews. Subsequently, it has discovered that the agreement made by the parties is valid and appropriate in accordance with the Indonesian Civil Code. However, there are considerable amount of matters in the process of formation and implementation of this agreement which do not comply with the current franchising law. These matters affect on how the principle of proportionality on this agreement cannot be achieved properly and fairly. The writer suggests that the government should provide more specific, direct and proportionality oriented provision on the franchising law.